Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI RATENGGARO DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Yosef Reynold Pandi[1], Hendrik Toda[2], David Rihi[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia[1,2,3]
Email: renolpandi@gmail.com[1]

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki potensi wisata alam dan budaya yang cukup besar, salah satunya Pantai Ratenggaro yang dikenal memiliki panorama pantai, kampung adat, dan nilai budaya yang khas. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya berkembang secara optimal akibat keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, promosi, serta rendahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pengembangan pariwisata Pantai Ratenggaro. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan wisatawan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, inisiator, dan koordinator dalam pengembangan destinasi wisata. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan pembangunan infrastruktur, belum optimalnya strategi promosi digital, rendahnya kualitas pelayanan wisata, serta terbatasnya pemberdayaan masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata yang telah dilakukan mampu membuka peluang ekonomi baru melalui usaha homestay, perdagangan suvenir, jasa transportasi, dan kuliner lokal, namun keberlanjutannya masih memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan investasi infrastruktur, pengembangan promosi berbasis digital, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan sebagai strategi utama dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata Pantai Ratenggaro.

Kata kunci: *Peran Pemerintah, Pengembangan Pariwisata, Pantai Ratenggaro, Tata Kelola Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat.*

ABSTRACT

Tourism has become one of the strategic sectors contributing significantly to regional economic development, employment creation, and community welfare.

Kybernology **ISSN 3031-1063**
Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
Volume 4 Nomor 1, Juni 2026
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/kybernology

Southwest Sumba Regency possesses considerable natural and cultural tourism potential, particularly Ratenggaro Beach, which is renowned for its coastal landscape, traditional village, and unique cultural heritage. However, this potential has not been optimally developed due to limited infrastructure, inadequate tourism facilities, weak promotional strategies, and insufficient stakeholder collaboration. This study aims to analyze the role of the Southwest Sumba Regency Government in developing tourism at Ratenggaro Beach. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation involving local government officials, village authorities, community members, and tourists. Data analysis followed the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the government has performed its functions as regulator, facilitator, initiator, and coordinator in tourism development. Nevertheless, policy implementation remains constrained by inadequate infrastructure development, suboptimal digital promotion, limited service quality, and insufficient community empowerment. Tourism development has generated new economic opportunities through homestays, handicraft businesses, transportation services, and local culinary enterprises. However, sustainable tourism development requires stronger collaboration among government institutions, indigenous communities, and the private sector. This study recommends strengthening collaborative governance, improving infrastructure investment, enhancing digital-based tourism promotion, and implementing sustainable community empowerment to improve the competitiveness of Ratenggaro Beach as a tourism destination.

Keywords: *Government Role, Tourism Development, Ratenggaro Beach, Collaborative Governance, Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Selain berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, sektor pariwisata juga mampu menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan investasi, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperkuat identitas sosial budaya masyarakat lokal. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pariwisata tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan wilayah yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sektor pariwisata sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam menyusun kebijakan, membangun infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, dan membangun kolaborasi dengan masyarakat serta sektor swasta.

Pemerintah Indonesia menempatkan sektor pariwisata sebagai

salah satu sektor prioritas pembangunan nasional melalui berbagai kebijakan strategis. Implementasi kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata, memperluas aksesibilitas, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memperkuat promosi pariwisata di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan tersebut juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi wisata yang dimiliki masing-masing wilayah melalui pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam merumuskan kebijakan pembangunan pariwisata sesuai karakteristik daerahnya sehingga keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat bergantung pada kapasitas tata kelola pemerintahan daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki keunggulan komparatif dalam sektor pariwisata. Keberadaan destinasi unggulan seperti Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, Pulau Alor, Pantai Nihiwatu, serta berbagai kampung adat menjadikan provinsi ini sebagai salah satu tujuan wisata yang terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Potensi tersebut didukung oleh kekayaan bentang alam, budaya lokal, tradisi masyarakat, dan keragaman atraksi wisata yang memiliki nilai jual tinggi di pasar pariwisata nasional maupun internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki sumber daya pariwisata cukup beragam. Potensi tersebut meliputi wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, hingga wisata sejarah yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten. Salah satu destinasi yang memiliki daya tarik paling kuat adalah Pantai Ratenggaro yang berada di Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo. Destinasi ini tidak hanya menawarkan panorama pantai yang masih alami, tetapi juga menyajikan kekayaan budaya masyarakat adat Sumba melalui keberadaan Kampung Adat Ratenggaro yang telah dikenal sebagai salah satu ikon budaya Pulau Sumba. Keunikan perpaduan antara bentang alam pesisir dengan rumah adat tradisional bertingkat tinggi menjadikan kawasan ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan destinasi wisata pantai lainnya di Indonesia. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk menjadikan Pantai Ratenggaro sebagai destinasi unggulan yang mampu meningkatkan daya saing sektor pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sumba Barat

Daya juga memperoleh legitimasi melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai objek wisata melalui pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan fasilitas penunjang, peningkatan aksesibilitas, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, transportasi, perhotelan, industri kreatif, dan usaha mikro masyarakat.

Sebagai salah satu destinasi unggulan, Pantai Ratenggaro memiliki karakteristik yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu berbasis alam dan budaya. Keberadaan ombak Samudera Hindia yang menjadi daya tarik wisata bahari berpadu dengan eksistensi kampung adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur memberikan pengalaman wisata yang autentik bagi wisatawan. Selain itu, keberadaan situs megalitik, ritual adat, tenun ikat khas Sumba, serta aktivitas masyarakat lokal menjadi bagian penting yang memperkaya atraksi wisata. Kombinasi antara daya tarik alam dan budaya tersebut merupakan modal utama dalam menciptakan destinasi wisata berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada pelestarian budaya lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai gambaran mengenai potensi pariwisata yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur, berbagai jenis destinasi wisata telah berkembang dan menjadi daya tarik utama wisatawan nasional maupun internasional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jenis Pariwisata	Potensi Utama
Wisata Alam	Taman Nasional Komodo, Danau Kelimutu, Pantai Ratenggaro, Pantai Oetune, Bukit Wairinding
Wisata Bahari	Pantai, snorkeling, diving, surfing, wisata pesisir
Wisata Budaya	Kampung adat, rumah adat, tenun ikat, upacara adat, situs megalitik
Wisata Sejarah	Peninggalan budaya dan situs sejarah lokal

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur (2025), diolah penulis.

Besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan destinasi wisata. Berbagai permasalahan masih ditemukan di lapangan, khususnya pada destinasi Pantai Ratenggaro. Hasil observasi menunjukkan bahwa akses jalan menuju lokasi wisata masih memerlukan peningkatan kualitas pada

beberapa titik, sementara fasilitas umum seperti toilet, area parkir, pusat informasi wisata, tempat sampah, serta fasilitas penunjang lainnya belum mampu memenuhi kebutuhan wisatawan secara optimal. Di sisi lain, promosi destinasi masih lebih banyak mengandalkan media sosial dan penyebaran informasi dari mulut ke mulut sehingga jangkauan pemasaran belum maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata yang dimiliki belum memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.

Permasalahan lain yang turut memengaruhi pengembangan kawasan wisata adalah masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi. Masyarakat lokal pada dasarnya telah mulai memanfaatkan peluang ekonomi melalui usaha kuliner, penjualan suvenir, homestay, serta jasa transportasi wisata. Namun demikian, pengembangan usaha tersebut masih bersifat sederhana dan belum didukung oleh pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, pelayanan wisata, maupun pengelolaan destinasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari strategi pembangunan pariwisata daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah memegang posisi sentral sebagai regulator yang menyusun kebijakan, fasilitator yang menyediakan sarana pendukung, dinamisator yang mendorong partisipasi masyarakat, sekaligus koordinator yang mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat pengembangan destinasi wisata melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, hingga wisatawan sebagai pengguna layanan.

Konsep tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) menjelaskan bahwa pembangunan destinasi wisata akan berjalan lebih efektif apabila pemerintah mampu membangun kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta secara setara. Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan Pantai Ratenggaro tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, melainkan juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat lokal, terjaganya kelestarian lingkungan, serta tetap lestarinya nilai-

nilai budaya yang menjadi identitas kawasan.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep peran pemerintah dalam pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Pitana dan Gayatri, yang menempatkan pemerintah sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator pembangunan pariwisata. Konsep tersebut dipadukan dengan teori *New Public Management* yang menekankan pentingnya efektivitas pelayanan publik, efisiensi pengelolaan sumber daya, orientasi terhadap hasil, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *governance* yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian mengenai pengembangan pariwisata telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi masyarakat, strategi pemasaran destinasi, atau pengembangan desa wisata. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengembangan destinasi wisata berbasis budaya di Pantai Ratenggaro masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu diisi melalui penelitian ini, khususnya dalam menganalisis bagaimana pemerintah menjalankan fungsi regulasi, fasilitasi, koordinasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan perspektif administrasi publik, tata kelola kolaboratif, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam menjelaskan peran pemerintah pada destinasi wisata yang menggabungkan potensi alam dan budaya lokal. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan destinasi wisata yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pengembangan pariwisata Pantai Ratenggaro melalui aspek kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata Kabupaten Sumba Barat Daya pada tingkat nasional maupun internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam pengembangan pariwisata Pantai Ratenggaro. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif melalui interpretasi terhadap fakta empiris yang diperoleh dari para informan (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di kawasan wisata Pantai Ratenggaro, Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu destinasi unggulan yang mengintegrasikan potensi wisata alam dan budaya, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata.

Fokus penelitian meliputi empat aspek utama, yaitu kebijakan pemerintah, penyediaan sarana dan prasarana, promosi dan pemasaran, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implementasi peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Daya, Camat Kodi Bangedo, Kepala Desa Maliti Bondo Ate, masyarakat sekitar, dan wisatawan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pemerintah, laporan pembangunan, peraturan perundang-undangan, data statistik, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi kawasan wisata, wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan dan pengelolaan destinasi, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkuat data empiris yang diperoleh di lapangan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu guna meningkatkan kredibilitas serta validitas hasil penelitian (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Ratenggaro

Pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu instrumen pembangunan daerah yang mampu memberikan dampak ekonomi,

sosial, maupun budaya secara simultan. Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan pengembangan destinasi wisata tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam merancang kebijakan, membangun koordinasi antarpemangku kepentingan, menyediakan infrastruktur pendukung, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai aktor utama yang mengintegrasikan kepentingan masyarakat, sektor swasta, dan berbagai institusi dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Menurut Pitana dan Gayatri (2005), pemerintah dalam pembangunan pariwisata menjalankan tiga fungsi utama, yaitu sebagai **motivator**, **fasilitator**, dan **dinamisator**. Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam menciptakan sistem pengelolaan destinasi wisata yang mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pariwisata. Sementara itu, dalam perspektif *collaborative governance*, keberhasilan pembangunan sektor publik bergantung pada kemampuan pemerintah membangun kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lainnya melalui proses koordinasi yang partisipatif (Ansell & Gash, 2008). Dengan demikian, efektivitas peran pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat dan keberlanjutan destinasi wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah berupaya menjalankan berbagai fungsi tersebut dalam pengembangan Pantai Ratenggaro. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pembangunan daerah, pembangunan fasilitas dasar kawasan wisata, pelaksanaan promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis pariwisata. Meskipun demikian, implementasi berbagai program tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pengelolaan destinasi wisata yang optimal. Berbagai hambatan masih ditemukan, terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran pembangunan, kualitas infrastruktur, koordinasi antarlembaga, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola kawasan wisata.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan destinasi wisata bukan hanya persoalan pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan. Osborne dan Gaebler (1992) menegaskan bahwa paradigma pemerintahan modern menempatkan pemerintah sebagai organisasi yang

mampu mengarahkan (*steering*) pembangunan melalui kemitraan dengan berbagai pihak, bukan semata-mata melaksanakan seluruh aktivitas pembangunan secara langsung (*rowing*). Dalam konteks Pantai Ratenggaro, pemerintah daerah telah berupaya menjalankan fungsi tersebut, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata

Kebijakan pemerintah merupakan fondasi utama dalam pembangunan sektor pariwisata karena menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan berbagai program pengembangan destinasi. Dalam sistem pemerintahan daerah, kebijakan tersebut diwujudkan melalui dokumen perencanaan pembangunan, regulasi daerah, serta berbagai program strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata. Keberadaan kebijakan yang jelas akan memberikan kepastian arah pembangunan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah memasukkan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Kebijakan tersebut tercermin melalui berbagai program peningkatan infrastruktur, pengembangan fasilitas wisata, promosi destinasi, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Pantai Ratenggaro. Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa informan menyampaikan bahwa sebagian program masih berjalan secara bertahap karena keterbatasan alokasi anggaran, luasnya wilayah pembangunan, serta tingginya kebutuhan pembangunan sektor lain yang juga menjadi prioritas pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, serta komitmen para pelaksana kebijakan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila salah satu unsur tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan cenderung sulit tercapai secara efektif.

Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi efektivitas pengembangan Pantai Ratenggaro. Pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menyediakan anggaran pembangunan yang memadai untuk memenuhi seluruh

kebutuhan infrastruktur kawasan wisata. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga masih memerlukan penguatan agar pembangunan infrastruktur, promosi, serta pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Wibowo dan Belia (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengintegrasikan berbagai program pembangunan dengan partisipasi masyarakat secara aktif. Apabila kebijakan hanya berorientasi pada pembangunan fisik tanpa memperhatikan penguatan kapasitas masyarakat, maka manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak akan berkembang secara optimal.

Dari perspektif teori *New Public Management*, pemerintah dituntut tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (Hood, 1991). Oleh karena itu, pengembangan Pantai Ratenggaro memerlukan sistem evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif sehingga setiap program pembangunan dapat diukur berdasarkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan wisata, serta daya saing destinasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki komitmen dalam mengembangkan Pantai Ratenggaro sebagai destinasi wisata unggulan Kabupaten Sumba Barat Daya. Akan tetapi, komitmen tersebut masih perlu diikuti dengan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengembangan model tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, kebijakan pengembangan pariwisata tidak hanya menghasilkan peningkatan jumlah kunjungan wisata

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah menjalankan perannya dalam pengembangan pariwisata Pantai Ratenggaro melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan koordinator. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana dasar, pelaksanaan promosi destinasi, serta upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Berbagai program yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan Pantai Ratenggaro sebagai salah satu destinasi unggulan

berbasis alam dan budaya di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur, belum memadainya fasilitas pendukung wisata, promosi yang masih terbatas, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan destinasi. Di samping itu, koordinasi antarpemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan kawasan wisata masih memerlukan penguatan agar pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara lebih terpadu dan berkelanjutan.

Pengembangan Pantai Ratenggaro tidak hanya membutuhkan investasi pada aspek fisik, tetapi juga memerlukan penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan destinasi wisata yang berdaya saing sekaligus mampu menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Hanif, N. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan daerah*. Grasindo.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration, 69*(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.

Paturusi, S. A. (2001). *Perencanaan tata ruang kawasan pariwisata*. Universitas Udayana Press.

Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata*. Andi.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutiarso, M. A. (2017). *Pengembangan destinasi pariwisata berbasis masyarakat*. Deepublish.

Suwantoro, G. (2004). *Dasar-dasar pariwisata*. Andi.

Suwarti, T., & Yuliamir, H. (2017). Pengembangan destinasi pariwisata berbasis potensi lokal. *Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 12*(2), 115–128.

Terok, S. C., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kawasan strategis Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik, 9*(1), 45–58.

Theobald, W. F. (2005). *Global tourism* (3rd ed.). Elsevier.

Ulum, S., & Suryani, D. A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Pariwisata Terapan, 5*(2), 120–136.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wibowo, M. S., & Belia, L. A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Nusantara, 5*(1), 35–49.

Yoeti, O. A. (2006). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.